



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 14 September 2015
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.15 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016..
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No.	Unit Eselon I/Program	Pagu Kebutuhan	Pagu Hasil Penajaman RAPBN TA 2016	Kekurangan
1.	Sekretariat Jenderal	600.000.000	435.431.285	164.568.715
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	250.000.000	233.348.834	16.651.166
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	350.000.000	202.082.451	147.917.549
2.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR)	112.560.000	105.813.829	6.746.171
3.	Ditjen Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan)	79.222.780.000	46.000.871.601	33.221.908.399
4.	Ditjen Cipta Karya (Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman)	24.145.640.000	17.500.312.951	6.645.327.049
5.	Ditjen Sumber Daya Air (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	62.025.170.000	29.713.919.902	32.311.250.098
6.	Ditjen Penyediaan Perumahan (Program Pengembangan Perumahan)	8.718.530.000	7.697.759.159	1.020.770.841
7.	Ditjen Pembiayaan Perumahan (Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan)	361.850.000	224.171.215	137.678.785
8.	Balitbang (Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR)	538.460.000	500.647.513	37.812.487
9.	Ditjen Bina Konstruksi (Program Pembinaan Konstruksi)	923.770.000	681.971.765	241.798.235
10.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Program pengembangan infrastruktur Wilayah)	948.840.000	500,312,500	448.527.500
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Program pengembangan Sumber Daya Manusia)	625.400.000	450,966,362	174.433.638
TOTAL		178.223.000.000	103.812.178.082	74.410.821.918

Selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah provinsi/kabupaten/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR RI mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi/kabupaten/kota tertentu.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 pada unit Eselon I dalam Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 14 September 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

TTD

FARY DJEMY FRANCIS